



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANWIL BPN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANGGAL 20 – 22 MARET 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 20 Maret 2024, yang dipimpin oleh Saan Mustopa, M.Si yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.

Kunjungan kerja spesifik tersebut adalah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Reforma Agraria dan beberapa program prioritas pertanahan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, khususnya di wilayah Provinsi Kepri.

Sebagai institusi yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap urusan keagrariaan atau pertanahan di Indonesia, Kementerian ATR/BPN dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, namun di sisi lain harus tetap bekerja sesuai dengan koridor sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN juga memiliki tugas penting terkait pelaksanaan program-program pertanahan yang menjadi prioritas, seperti antara lain masalah pensertifikatan, pemetaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang & tanah, penanganan akses reform, hingga penanganan kasus-kasus pertanahan.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab tersebut sudah barang tentu hanya dapat terimplementasi dengan baik oleh Kementerian ATR/BPN apabila didukung oleh seluruh jajarannya di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai mitra kerja dari Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selalu berupaya mendukung sekaligus mengawasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN agar senantiasa dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program-program prioritas maupun dalam menangani berbagai masalah pertanahan yang ada.

Dalam kunjungan ke Provinsi Kepri, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri, serta dihadiri pula oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN (Iljas Tedjo Priyono).

Dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Capaian reforma agraria di wilayah Provinsi Kepri, dari total luas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 223.269,07 Ha, total yang sudah sertifikat adalah 91.930,60 Ha yang terdiri dari Redistribusi Tanah (10.659,01 Ha), PTSL (67.863,66 Ha), dan legalisasi lainnya (13.407,92 Ha). Dengan demikian masih terdapat luasan lahan sebesar 131.338,47 Ha yang belum bersertifikat ataupun masih dalam proses.
2. Beberapa hambatan/kendala dalam upaya pencapaian target secara optimal adalah:
 - Subyek hak tidak berada di tempat;
 - Pemohon PTSL tidak memiliki bukti kepemilikan tanah (alas hak) yang lengkap sesuai ketentuan;
 - Kurangnya animo masyarakat dalam mendaftarkan bidang tanahnya dikarenakan *formal gap* pengurusan pajak setelah terbit sertifikat;
 - Wilayah berupa pulau-pulau yang letaknya jauh dari lokasi Kantor Pertanahan sehingga membutuhkan sumber daya yang relatif besar, sementara di sisi lainnya SDM dan peralatan yang dimiliki masih terbatas;
 - Obyek bidang tanah berada dalam penetapan kawasan hutan;
 - Khusus di Kota Batam, penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) membutuhkan rekomendasi penerbitan SHAT dari BP Batam sebagai Pemegang Hak Pengelolaan dan SK Capes dari Walikota Batam di atas wilayah Kampung Tua.
3. Penyelesaian berbagai konflik agraria seringkali masih terbentur ego sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diadakan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Summit pada bulan Agustus 2023 di Kabupaten Karimun yang menghasilkan deklarasi yang merupakan wujud kerja bersama sebagai modal untuk mengeliminir ego sektoral yang masih sering terjadi dalam upaya penyelesaian konflik agraria.
4. Pelaksanaan tugas Tim GTRA masih belum optimal, hal ini dikarenakan anggaran yang terbatas, yaitu hanya melalui APBN, sementara Pemerintah Daerah belum memiliki kesiapan untuk menganggarkan kegiatan GTRA melalui APBD. Disamping itu, kegiatan GTRA seharusnya dianggap sebagai kegiatan bersama baik oleh OPD di Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal terkait,

dan Anggota yang tergabung dalam Tim GTRA harus senantiasa terlibat aktif dalam setiap rangkaian kegiatan GTRA.

5. Beberapa isu strategis terkait masalah ketataruangan di wilayah Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya keterpaduan kegiatan pertambangan dengan RTRW Kepri;
 - Terdapat pemukiman di wilayah pesisir belum diatur dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota;
 - Adanya perbedaan penentuan garis pantai antara Kementerian Kelautan & Perikanan dengan Pemerintah Daerah dalam produk Rencana Tata Ruang;
 - Perlu percepatan revisi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR guna peningkatan iklim investasi dan kegiatan berusaha di beberapa Kabupaten/Kota yang terkoneksi dengan Online Single Submission (OSS);
 - Belum adanya sinkronisasi RDTR Pemerintah Kota Batam dengan sistem GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang).

6. Khusus terkait dengan tindak lanjut permasalahan di Rempang, BP Batam telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran SK sebagai upaya untuk:
 - Melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada warga terdampak;
 - Mengajukan permohonan penyerahan aset kepada Pemkot Batam;
 - Penegakan hukum terhadap badan usaha; dan
 - Pembebasan penguasaan atas tanah perorangan.

Namun demikian hingga saat ini proses pendaftaran perpanjangan jangka waktu belum terbit karena persyaratan sebagaimana ditentukan pada diktum SK HPL belum terpenuhi.

Seluruh masukan dan informasi yang diterima oleh Komisi II DPR RI menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN maupun dengan instansi terkait lainnya.

Kota Batam, 20 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.